



LATAR BELAKANG PEMANGKASAN NASIONAL



- **Keputusan Kementerian Keuangan:** Pemangkasan TKD ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk seluruh provinsi di Indonesia.
- **Total anggaran yang dipangkas:** Secara nasional, total anggaran yang dipangkas mencapai Rp 200 triliun.
- **Tujuan efisiensi:** Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemangkasan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menekan kebocoran penggunaan anggaran daerah.

Imbas Pemangkasan TKD, Proyek Infrastruktur Dikurangi

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mulai berhitung imbas pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Salah satu berpotensi terdampak adalah pada sektor belanja modal.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, pada tahun depan TKD ke Kota Jogja akan berkurang sekitar Rp 250 miliar. Turun sekitar 26 persen dari alokasi pada tahun sebelumnya.

Jika secara nominal, pemkot hanya menerima sekitar Rp 725 miliar tahun depan. Sementara pada tahun ini TKD yang diterima sebesar Rp 975,93 miliar.

Namun, Hasto mengaku belum mengetahui secara rinci terkait dengan besar pemangkasan. Sebab pemerintah daerah masih menunggu kepastiannya lewat daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2026.

"Itu (Rp 250 miliar) estimasi kami, kalau dipotong sekitar 21 sampai 26 persen," ujar Hasto saat ditemui di SDN Pujokusuman, Selasa

(7/10) lalu.

Hasto menyebut, jika TKD terpangkas maka akan berdampak pada belanja modal pemkot. Sehingga proyek perbaikan jalan, pembangunan gedung, atau perbaikan infrastruktur berpotensi tidak direalisasikan.

Namun demikian, pemkot tetap memprioritaskan anggaran untuk program-program pendidikan dan kesehatan. Sebab kedua sektor tersebut sudah mendapatkan prioritas. Karena menjadi mandatori presiden.

"Anggaran pendidikan dan kesehatan itu bisa mencapai 47 persen," bebernya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan menurunkan TKD ke seluruh provinsi di Indonesia. Total anggaran yang dipangkas mencapai Rp 200 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pemangkasan TKD dilakukan untuk meningkatkan efisiensi. Sekaligus menekan kebocoran penggunaan anggaran daerah. (*inu/wia/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005